

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.<sup>1</sup>

GBHN merupakan rencana pembangunan nasional jangka panjang. Program-programnya diarahkan untuk mencapai Tujuan Nasional seperti yang termaktup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang esensinya adalah: terwujudnya suatu masyarakat yang cerdas, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dengan demikian GBHN sebagai rencana pembangunan nasional jangka panjang dapat dianggap sebagai

---

<sup>1</sup> Repelita Tahun 1994/1995 – 1998/1999. Buku V, hal 538

rencana perspektif, atau rencana yang memberikan gambaran umum mengenai keadaan yang kita kehendaki akan tercapai pada akhir waktu rencana tersebut.<sup>2</sup>

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme<sup>3</sup>. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan, koordinasi, dan keterpaduan antar sektor. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral tersebut dilaksanakan di masing-masing daerah sesuai dengan keadaan, kondisi, dan potensi yang dimiliki.

Pemerintah melaksanakan kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menyasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor

---

<sup>2</sup> B.S Muljana, *Perencanaan Pembangunan Nasional: Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*, UI Pres, Jakarta, 2001.

<sup>3</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah 1999

pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh tanah air.

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang mendasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan. Program pembangunan ekonomi berkelanjutan bertumpu pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan mendasarkan pada mekanisme pasar dan berbasis pada sumber daya alam, sumber daya manusia yang produktif dan mandiri. Program prioritas pembangunan ekonomi meliputi program-program jangka pendek untuk percepatan pemulihan ekonomi dan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat. Sedangkan prioritas pembangunan ekonomi jangka menengah adalah program-program untuk membangun landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut diperlukan dukungan dan program-program pembangunan perwilayahan; pemantapan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah; peningkatan keterpaduan dan kerjasama pengelolaan pembangunan perwilayahan; serta program-program di bidang ketahanan pangan.

Secara makro pertumbuhan atau kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah. Kenaikan PDRB berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi tiap sektor di daerah, dimana dalam hal ini PDRB di kategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, yaitu :

1. sektor Pertanian
2. sektor Pertambangan dan Penggalian
3. sektor Industri Pengolahan
4. sektor Listrik, Gas, dan Air bersih
5. sektor Pembangunan
6. sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
7. sektor Angkutan dan Komunikasi
8. sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. sektor Jasa-jasa

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut di atas. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 dapat memberikan gambaran keberhasilan tiap daerah/kota di Jawa Tengah dalam melaksanakan strategi pelaksanaan pembangunan daerah masing-masing terlihat pada pertumbuhan PDRB. Ketimpangan pertumbuhan PDRB menunjukkan bahwa dibutuhkan perencanaan pembangunan yang matang untuk menyongsong otonomi daerah. Daerah dituntut secara aktif untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuannya sendiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat.

Distorsi ekonomi yang terjadi selama dua tahun (1997-1998) menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun

regional. Pemulihan ekonomi nampaknya perlu waktu untuk mencapai kondisi yang normal, karena situasi ekonomi dan politik yang belum menentu.

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993**  
**Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1997 – 2001**  
**(Juta Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	1997	1998	1999	2000	2001
1	Cilacap	5.266.134,53	5.878.365,88	6.099.644,82	6.521.550,42	6.846.182,16
2	Banyumas	1.055.399,40	983.564,12	988.804,68	1.028.604,67	1.040.236,79
3	Purbalingga	641.733,80	588.640,26	595.126,84	611.664,77	629.866,08
4	Banjarnegara	876.076,83	839.747,46	841.678,42	851.218,96	852.466,99
5	Kebumen	994.820,97	865.213,30	859.256,17	899.383,01	915.370,26
6	Porworejo	697.255,58	652.005,26	668.176,79	684.306,71	707.550,88
7	Wonosobo	570.309,65	516.882,01	502.526,04	522.318,24	527.635,31
8	Magelang	1.035.324,07	1.002.789,27	1.019.215,60	1.054.929,26	1.096.201,91
9	Boyolali	965.959,65	874.133,43	884.481,69	902.682,45	935.467,99
10	Klaten	1.295.075,63	1.148.045,58	1.153.627,74	1.199.551,88	1.247.746,75
11	Sukoharjo	1.195.897,01	1.061.616,80	1.074.922,61	1.112.790,80	1.157.846,99
12	Wonogiri	778.762,78	742.361,47	756.802,53	783.586,53	804.087,16
13	Karanganyar	1.255.719,50	1.113.939,92	1.141.544,82	1.193.085,08	1.210.084,81
14	Sragen	730.947,74	664.414,00	677.594,02	696.930,13	712.656,17
15	Grobogan	770.949,72	695.853,12	674.329,35	711.715,54	741.821,42
16	Blora	739.068,56	682.333,12	688.893,26	702.214,14	723.134,79
17	Rembang	519.951,68	466.648,91	480.222,34	504.132,77	524.181,35
18	Pati	961.872,65	923.174,19	937.480,81	940.874,70	969.013,34
19	Kudus	3.408.438,73	3.006.674,93	3.030.322,68	3.087.617,87	3.185.798,25
20	Jepara	939.091,14	939.325,15	945.638,80	989.279,74	1.037.969,05
21	Demak	790.037,43	706.938,94	723.427,58	744.316,44	769.047,86
22	Semarang	1.198.451,05	985.228,37	999.629,79	1.047.365,80	1.082.378,77
23	Temanggung	737.658,22	659.706,26	674.562,25	697.991,69	728.586,02
24	Kendal	1.640.379,52	1.487.955,88	1.517.220,96	1.550.532,38	1.594.832,69
25	Batang	769.655,54	691.365,49	707.438,02	721.649,41	737.198,22
26	Pekalongan	889.637,63	812.568,88	842.326,12	862.264,91	899.546,40
27	Pemalang	1.050.820,79	1.033.694,11	1.050.130,47	1.089.043,63	1.124.314,36
28	Tegal	931.749,07	847.663,63	869.114,69	911.693,10	952.070,98
29	Brebes	1.236.706,79	1.264.853,81	1.320.755,76	1.381.023,44	1.447.843,91
30	Kota Magelang	318.094,92	294.902,08	306.308,29	318.423,23	328.162,25
31	Surakarta	1.432.582,37	1.233.018,44	1.250.807,41	1.302.715,92	1.353.882,64
32	Salatiga	244.998,97	241.288,25	245.601,15	254.362,19	263.644,76
33	Semarang	5.793.806,96	4.737.732,57	4.899.241,89	5.142.532,90	5.405.239,41
34	Pekalongan	437.613,99	402.045,65	417.953,57	434.639,68	453.338,37
35	Tegal	350.686,48	329.220,91	341.508,56	358.969,56	377.701,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1997-2001.

Apabila pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah dapat ditingkatkan, hal tersebut tentunya akan sangat mendukung adanya peningkatan PDRB propinsi Jawa Tengah. Berikut pada Tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah, yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB tiap tahun kecuali untuk tahun 1998, dimana hal ini disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia.

**Tabel 1.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah**  
**Atas Dasar Harga Konstan 1983 dan 1993**  
**Tahun 1992 - 2000**  
**(Jutaan Rupiah)**

No	Tahun	Total PDRB
1	1992	13.969.999,53
2	1993	33.978.959,16
3	1994	36.345.174,48
4	1995	39.013.952,94
5	1996	41.292.375,96
6	1997	42.469.892,90
7	1998	39.345.591,32
8	1999	40.214.745,45
9	2000	41.975.900,46

Sumber : BPS Jawa Tengah Berbagai Terbitan

Keterangan : Tahun 1992 – 1993, berdasarkan harga konstan 1983

Tahun 1994 – 2000, berdasarkan harga konstan 1993

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan PDRB propinsi Jawa Tengah dari tahun 1992 hingga tahun 2000. Pada tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB propinsi Jawa Tengah cenderung meningkat, yaitu pada tahun 1992 PDRB baru sebesar 13.969.999,53 juta rupiah. Selanjutnya meningkat pada lima tahun kemudian tepat pada tahun 1997 jumlah PDRB telah mencapai 42.469.892,90 juta rupiah, tetapi pada tahun 1998 perekonomian Indonesia ditandai dengan laju pertumbuhan yang negatif, nilai

PDRB pada tahun 1998 berjumlah 39.345.591,32 juta rupiah. Namun di tahun selanjutnya mengalami peningkatan hingga di tahun 2000 menjadi 41.975.900,46 juta rupiah.

Data yang tercantum pada tabel di atas merupakan total PDRB yang di peroleh propinsi Jawa Tengah dan seharusnya kita kembali dapat menginstropeksi perencanaan dan strategi pembangunan masing-masing daerah, sekaligus untuk mengevaluasi setiap pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui sektor-sektor kegiatan ekonomi yang dapat diprioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Masalah utama di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanaan yang matang serta kurang jelinya pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dari tahun ke tahun dalam sektor ekononi. Disinilah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) cukup dominan dalam menentukan arah serta perencanaan pembangunan di daerah agar pembangunan di daerah berjalan sesuai dengan prioritas sektor yang diinginkan.

Situasi politik saat ini masih mewarnai perjalanan ekonomi Indonesia. Lonjakan pertumbuhan ekonomi seperti beberapa tahun yang lalu sebelum terjadinya krisis nampaknya belum bisa diharapkan. Meskipun begitu tanda-tanda perbaikan ekonomi ke arah yang lebih mapan mulai terlihat. Badai krisis ekonomi nasional sejak paruh waktu 1997 banyak berpengaruh terhadap situasi perekonomian di Jawa Tengah. Dampak krisis ekonomi ternyata telah mempengaruhi struktur ekonomi Jawa Tengah. Kurs rupiah yang tercatat masih

relatif tinggi dan belum stabil, utamanya karena dipicu oleh kondisi politik yang kurang kondusif, sehingga sangat berpengaruh terhadap kegiatan sektor-sektor yang tergantung kepada bahan baku impor.

Kondisi seperti yang disebutkan diatas juga berdampak pada daerah-daerah di Jawa Tengah. Salah satu kota yang juga ikut mengalami dampak krisis tersebut adalah Kota Surakarta. Sejak terjadinya krisis ekonomi dan kerusuhan Mei 1998, Kota Surakarta saat itu di landa bumi hangus. Sejumlah bangunan publik, kantor, pertokoan, juga toko swalayan atau pusat perbelanjaan dirusak dan dihancurkan, bahkan sebagian terbakar habis. Perekonomian Kota Surakarta lumpuh, gairah usaha mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya inflasi yang sangat tinggi hingga mencapai 66,38%, sehingga mengakibatkan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dan melonjaknya harga bahan baku yang dipergunakan untuk berproduksi oleh pengusaha-pengusaha yang terdapat di Kota Surakarta. Dampak dari seluruh kejadian tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan Kota Surakarta menurun sangat tajam hingga mengalami pertumbuhan yang minus pada tahun yang sama, yaitu sebesar -13,93%. Namun setahun kemudian laju pertumbuhan perekonomian Surakarta telah mengalami surplus tetapi masih dalam prosentase yang kecil, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta**  
**Tahun 1994-2001**  
**(Juta Rupiah)**

Tahun	Berlaku		Konstan	
	Nilai	%Perubahan	Nilai	%Perubahan
1994	1.252.204,55	17,29	1.158.730,34	8,54
1995	1.416.417,73	16,45	1.258.960,51	8,65
1996	1.597.183,04	12,81	1.374.559,01	8,70
1997	1.725.142,86	8,01	1.432.582,37	4,44
1998	2.220.348,20	28,71	1.233.018,44	(-13,93)
1999	2.545.175,03	14,63	1.250.807,41	1,44
2000	2.965.128,91	16,50	1.302.715,92	4,15
2001	3.321.685,63	12,02	1.355.051,97	3,93

Sumber : BPS Kota Surakarta, Laju Pertumbuhan Tahun 1994-2001

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari harga berlaku tahun 2001 kenaikannya sebesar 12,02% lebih kecil bila di bandingkan tahun 2000 dimana kenaikannya sebesar 16,50%, namun pada harga konstan mengalami penurunan sebesar 3,93% dibanding tahun 2000 sebesar 4,15%. Dari tabel tersebut juga bisa terlihat bahwa semenjak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan bahkan pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi (-13,93) sedangkan pada tahun 1994-1996 pertumbuhan ekonomi relatif baik dan mulai tahun 1999-2001 terjadi pertumbuhan positif meskipun keadaan ekonomi masih belum menggembirakan.

Saat ini perekonomian di Kota Surakarta beranjak mengalami pertumbuhan positif, dunia usaha mulai bergairah untuk menanamkan investasinya ke Kota Surakarta, banyak usaha dan pertokoan yang dulu habis binasa kini membuka kembali usahanya. Di samping itu, ada sejumlah investor luar, yang disebut *new comers*, yang menanamkan investasi di Surakarta di bidang usaha retail. Selain perekonomian yang mulai stabil, jaminan keamanan

yang diberikan oleh pemerintah kota telah mendorong para investor masuk dan berinvestasi di Kota Surakarta, sehingga PDRB Kota Surakarta akan mengalami peningkatan.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah naiknya pertumbuhan ekonomi melalui naiknya PDRB yang berarti pula akan menaikkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pergeseran-pergeseran ekonomi dalam struktur ekonomi di Kota Surakarta dan sektor-sektor yang potensial dalam perekonomian Kota Surakarta, dengan kurun waktu dalam penelitian ini adalah antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“Analisis Struktur Perekonomian Kota Surakarta Periode Tahun 1997 - 2001.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pembangunan daerah di arahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendayagunaan potensi yang dimiliki daerah secara optimal. Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi Kota Surakarta dibandingkan dengan propinsi Jawa Tengah berdasar analisis Shift-Share (S-S) ?
2. Apa saja yang akan menjadi sektor ekonomi unggulan Kota Surakarta ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertumbuhan sektor ekonomi Kota Surakarta dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi propinsi Jawa Tengah berdasar analisis Shift-Share
2. Untuk menganalisis pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang diharapkan dapat menjadi sektor ekonomi unggulan pada masa yang akan datang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.
2. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi mengenai pertumbuhan sektor-sektor perekonomian yang terjadi di Kota Surakarta.
3. Dapat mengetahui potensi-potensi perekonomian yang dimiliki oleh Kota Surakarta, sehingga dapat di maksimalkan hasil dari potensi tersebut untuk menambah pendapatan daerah Surakarta.
4. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan tema diatas.
5. Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada serta laporan-laporan dari instansi tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder adalah :

1. Jawa Tengah dalam angka, BPS tahun 1997-2001.
2. Surakarta dalam angka, BPS tahun 1997-2001.
3. Indikator Makro Ekonomi, BPS tahun 1997-2001.
4. Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kota Surakarta.

### 1.5.2. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu :

1. analisis Kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan rumus, tetapi sifatnya berupa penjelasan dan keterangan-keterangan pelengkap.
2. analisis Kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan rumus-rumus yang tersedia yang sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis perencanaan pembangunan yaitu *Shift-Share (S-S)* dan analisis *Location Quotient (LQ)*. Teknik Shift-Share adalah suatu teknik analisis di dalam perencanaan pembangunan yang menganalisa bagaimana masing-masing sektor dalam perekonomian daerah tumbuh dari tahun ke tahun terhadap perekonomian secara nasional dengan cara membandingkan kinerja sektor ekonomi secara

nasional. Teknik *Shift-Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan suatu variabel wilayah (D) yaitu pendapatan atau output sektor-sektor ekonomi daerah selama kurun waktu tertentu mejadi pengaruh pertumbuhan propinsi (N). Pengaruh pertumbuhan propinsi di sebut pengaruh pangsa (*Share*), bauran industri (M), pengaruh bauran industri disebut bauran komposisi (proporsional *Shift*) dan keunggulan kompetitif (C), pengaruh keunggulan kompetitif disebut *regional share*, karena itulah teknik analisis ini dinamakan teknik analisis *Shift-Share*. Menurut Prasetyo Soepono (1993) bentuk umum persamaan dari analisis *Shift-Share* dan komponen-komponennya adalah sebagai berikut :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan :

i = sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = variabel ekonomi yang diteliti

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan atau nilai sektor yang dinotasikan sebagai (y) :

$$D_{ij} = y_{ij}^* - y_{ij}$$

$$N_{ij} = y_{ij} \cdot m$$

$$M_{ij} = y_{ij} \cdot (r_{in} - m)$$

$$C_{ij} = y_{ij} \cdot (r_{ij} - r_{in})$$

Dimana  $r_{ij}$ ,  $r_{in}$ , dan  $m$  mewakili laju pertumbuhan daerah tingkat II dan daerah tingkat I yang masing-masing di definisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{(y^*_{ij} - y_{ij})}{y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(y^*_{in} - y_{in})}{y_{in}}$$

$$m = \frac{(y^*_n - y_n)}{y_n}$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor I di wilayah adalah :

$$D_{ij} = y_{ij} \cdot m + y_{ij}(r_{in} - m) + y_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

- D = variabel wilayah
- N = pertumbuhan propinsi
- M = bauran industri
- C = keunggulan komparatif (*regional share*)
- $y_{ij}$  = pendapatan sektor i di wilayah j (kabupaten/kota)
- $y_{in}$  = pendapatan sektor I di wilayah n (propinsi)
- $y^*$  = pendapatan tahun akhir
- $r_{ij}$  = laju pertumbuhan sektor i di wilayah j (kabupaten/kota)
- $r_{in}$  = laju pertumbuhan sektor I di wilayah n (propinsi)
- $m$  = laju pertumbuhan PDRB di wilayah N (propinsi)

Teknik analisis *Location Quotient* merupakan salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menganalisa sektor potensial atau sektor basis dalam perekonomian suatu daerah dengan membandingkan peranan sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah dengan sektor sejenis dalam perekonomian secara nasional.

Rumus menghitung dengan teknik analisis *Location Quotient* adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{X_i/X_t}{Y_i/Y_t}$$

Keterangan :

- LQ = koefisien LQ
- $X_i$  = pendapatan di sektor ekonomi daerah
- $X_t$  = pendapatan total daerah
- $Y_i$  = pendapatan di sektor ekonomi nasional
- $Y_t$  = pendapatan total ekonomi nasional

Klasifikasi LQ :

$LQ > 1$  merupakan sektor unggulan dan kemampuan produksi sektor tersebut di suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan sektor sejenis secara nasional.

$LQ = 1$  kemampuan produksi sektor tersebut sama dengan sektor sejenis secara nasional.

$I.Q < 1$  bukan merupakan sektor unggulan dan kemampuan produksi sektor tersebut lebih kecil dibandingkan sektor sejenis secara nasional.

Dalam penelitian ini digunakan asumsi sebagai berikut :

1. selera dan pola pengeluaran di suatu daerah dengan daerah lain di Indonesia adalah sama.
2. setiap penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang sama dengan pola permintaan barang dan jasa pada tingkat nasional.
3. tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang dan jasa di setiap daerah adalah sama.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

##### **BAB I      Pendahuluan**

Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II     Gambaran Umum Perekonomian Propinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta**

Bab ini berisikan gambaran umum tentang perekonomian yang terjadi di propinsi Jawa tengah dan perekonomian di Kota Surakarta.

**BAB III Landasan Teori**

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, sehingga dapat menempatkan penelitian ini ke dalam perspektif teori yang wajar.

**BAB IV Kajian Pustaka**

Bab ini mencakup beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian ini.

**BAB V Analisis Data Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan hasil perhitungan dan pengolahan data disertai dengan analisisnya.

**BAB VI Kesimpulan dan Implikasi**

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari pembahasan yang disajikan beserta implikasinya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Situasi politik masih mewarnai perjalanan ekonomi Indonesia. Lonjakan pertumbuhan ekonomi seperti kondisi lima tahun yang lalu nampaknya belum bisa diharapkan. Meskipun begitu tanda-tanda perbaikan ekonomi ke arah yang lebih mapan mulai terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dari kondisi perekonomian regional Jawa Tengah secara perlahan-lahan mulai bangkit dengan ditandai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 sebesar 3,90%, walaupun kondisi tersebut tidak bergeser dari tahun 1999 yang tumbuh sebesar 3,49%. Kondisi perekonomian Jawa Tengah memang sempat terpuruk pada tahun 1998 dengan menikmati pertumbuhan - 11,74%.

#### **2.1. Propinsi Jawa Tengah**

Letak geografis Jawa Tengah sebagaimana diketahui terletak antara dua propinsi besar, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Barat tumbuh maju dan berkembang sejalan oleh letaknya yang berdekatan dengan pusat kegiatan ekonomi (DKI Jakarta), sehingga menjadikan propinsi tersebut sebagai penyangga bagi perluasan ekonomi DKI Jakarta. Propinsi Jawa Timur telah tumbuh sebagai kekuatan ekonomi menguasai pasar di belahan timur Indonesia dengan industri besar dan sedangnya yang maju serta infrastruktur yang memadai. Kelebihan yang dimiliki Jawa Tengah dalam proses pembangunan

menurut anggapan-anggapan dari berbagai pihak adalah kondisi alam dan sumber daya alamnya masih tetap terjaga dan berpotensi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara agregat tahun 1995-1996 masih menggairahkan, atas dasar harga konstan mencapai sekitar 7%. Sejak krisis pertengahan tahun 1997 pertumbuhan ekonomi tersebut merosot tajam menjadi 3,03%, dan tahun berikutnya turun drastis menjadi - 11,74%. Meskipun pada periode 1999-2000 mulai bergairah dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,49% serta 3,90%. Secara rata-rata pada periode 1996-2000 Jawa Tengah masih mengalami pertumbuhan relatif kecil yaitu - 0,33%. Laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Dampak krisis ekonomi ternyata telah mempengaruhi struktur ekonomi Jawa Tengah, hal ini bisa dilihat dari peranan masing-masing sektor pada kurun waktu 1996-2000. Kurs rupiah yang tercatat masih relatif tinggi dan belum stabil utamanya karena dipicu oleh kondisi politik yang kurang kondusif, sehingga sangat berpengaruh terhadap kegiatan sektor-sektor yang tergantung pada bahan baku impor. Di sisi yang lain kondisi harga beberapa komoditi yang belum juga stabil dan cenderung merambat naik, menyebabkan sulitnya perluasan usaha-usaha beberapa sektor karena takut merugi.

Berawal dari sektor pertanian yang merupakan sektor andalan masih bisa bertahan akibat krisis, bahkan peranannya sedikit mengalami kenaikan, pada tahun 1996 sebelum krisis peranan sektor tersebut sebesar 21,78%, tahun 1999 dan tahun 2000 menjadi 25,09% serta 25,61%. Kenaikkan peranan yang sama pada periode tersebut juga dirasakan oleh sektor-sektor yang lain seperti

sektor bangunan, perdagangan-hotel-restoran serta angkutan-telekomunikasi. Peranan yang relatif kecil dialami oleh sektor pertambangan-penggalan, dari 1,20% pada tahun 1996 sedikit tergeser pada tahun 2000 menjadi sebesar 0,97%.

**Tabel 2.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB**  
**Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 1996-2000**  
**(persen)**

Lapangan Usaha	1996		1997		1998		1999		2000	
	HB	HK								
Pertanian	21,78	20,28	21,87	19,05	25,81	20,86	25,09	20,78	25,61	20,64
Pertambangan dan Galian	1,20	1,26	1,14	1,36	1,06	1,43	1,00	1,46	0,97	1,44
Ind. Pengolahan	32,18	31,84	32,02	31,79	27,60	30,76	29,10	30,55	28,55	30,35
Listrik, Gas dan Air Minum	0,74	0,83	0,74	0,91	0,68	1,07	0,65	1,14	0,74	1,21
Bangunan	4,44	4,81	4,34	4,96	3,55	3,82	3,92	4,13	4,07	4,03
Perdag., Restoran dan Hotel	20,93	21,58	21,08	22,29	23,52	22,98	22,99	22,91	23,33	23,53
Pengangkutan dan Telekom.	3,95	4,07	3,84	4,10	4,23	4,64	4,11	4,94	4,40	5,02
Keu., Persew., dan Jasa Prshn.	5,01	5,05	5,45	5,29	3,67	3,95	3,65	3,96	3,69	3,92
Jasa-jasa	9,77	10,29	9,53	10,25	9,88	10,50	9,49	10,12	8,65	9,87
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah

Sektor berikutnya yaitu sektor perdagangan yang merupakan salah satu sektor dengan andil yang cukup dominan terhadap perekonomian Jawa Tengah pada periode 1996-2000 perannya cenderung naik, pada tahun sebelum krisis (1996) peranan sektor tersebut tercatat sebesar 20,93% setelah krisis pada tahun 2000 tumbuh menjadi sebesar 23,33%. Sementara itu untuk sektor angkutan-telekomunikasi juga mengalami kenaikan peranan relatif kecil, dari 3,95% pada tahun 1996 menjadi 4,40% pada tahun 2000. Sebaliknya untuk peranan

sektor jasa-jasa pada keadaan yang sama terlihat menurun dari 9,77% menjadi 8,65%.

Krisis ekonomi dan moneter menyebabkan bergesernya peranan beberapa sektor. Dampak tersebut sangat terasa pada sektor industri, dengan adanya gejolak harga yang belum menentu mengakibatkan produksi sektor industri jatuh bangun sehingga pada tahun 2000 memberikan peranan sebesar 28,55% turun dari tahun 1996 yang tercatat 32,18%. Untuk sektor bangunan peranannya terhadap PDRB Jawa Tengah pada keadaan yang sama sedikit menurun, dari 4,44% pada tahun 1996 menjadi 4,07% pada tahun 2000.

Peranan sektor keuangan-persewaan-jasa perusahaan mulai tahun 1996 juga terus menurun. Upaya restrukturisasi perbankan yang dilakukan pemerintah memang perlu waktu sehingga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Akuisisi serta likuidasi bank-bank untuk menyelamatkan bank yang “kembang-kempis” kondisi keuangannya sepertinya masih perlu waktu, meskipun pemerintah telah menyuntikkan dananya. Pada awal krisis (tahun 1997) peranan sektor tersebut tercatat sebesar 5,45%. Krisis ekonomi menjadikan kondisi perbankan secara umum juga mengalami krisis, kebijakan perbankan yang dikeluarkan pemerintah nampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, peranan sektor ini tiga tahun berturut-turut hanya tercatat sebesar 3,67%, 3,65%, serta 3,69%. Kondisi yang sama juga dialami oleh sektor konstruksi, suku bunga bank yang relatif masih tinggi menyebabkan sektor ini “mati suri” karena perputaran modal yang terhambat.

Kontribusi pada tahun 1996 sebesar 4,44% sedikit bergeser menjadi 4,07% pada tahun 2000.

## **2.2. Kota Surakarta**

Kota Surakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92 meter diatas permukaan air laut, yang berarti lebih rendah atau hampir sama tingginya dengan permukaan sungai Bengawan Solo. Kota Surakarta terletak diantara : 110 45'15" – 110 45'35" Bujur Timur, 70 36' – 70 56' Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

Pengaruh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun pertengahan tahun 1997 juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk kota Surakarta. Kota yang pada tahun 1998 pernah dilanda oleh kerusuhan masa yang sangat besar dan mengakibatkan terjadinya inflasi yang cukup tinggi hingga mencapai 66,38% sehingga mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Dampak dari kejadian tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan kota Surakarta pada tahun yang sama menurun sangat tajam sebesar -13,93%. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya perekonomian kota Surakarta berangsur-angsur membaik. Laju pertumbuhan kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Surakarta Tahun 1996 - 2001**  
**(persen)**

Lapangan Usaha	Tahun					
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Pertanian	-17.12	12.82	79.97	5.55	7.49	9.21
Pertambangan dan Galian	20.64	16.03	9.91	8.41	7.9	8.74
Ind. Pengolahan	17.59	8.57	70.03	5.25	14.99	11.18
Listrik, Gas dan Air	15.64	11.2	37.38	7.18	10.99	8.81
Minum						
Bangunan	11.73	6.35	4.16	8.32	16.73	9.74
Perdag., Restoran dan Hotel	12.36	9.47	17.14	29.9	23.34	11.86
Pengangkutan dan Telekom.	22.17	8.02	26.15	14.42	12.2	11.89
Keu., Persew., dan Jasa Prshn.	8.21	5.3	-5.35	20.09	17.35	16.94
Jasa-jasa	7.64	7.76	21.72	18.36	12.31	13.41
<b>Total PDRB</b>	<b>12.63</b>	<b>8.01</b>	<b>28.71</b>	<b>14.63</b>	<b>16.5</b>	<b>12.02</b>

Sumber: BPS Kota Surakarta

Tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang dimulai tahun 1996 yaitu sebesar 12,63%, menurun pada tahun 1997 menjadi 8,01%. Tetapi pada tahun 1998 pertumbuhan mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai 28,71%, hal ini menjadi pertanda bahwa perekonomian kota Surakarta sudah membaik. Namun pada tahun 1999 pertumbuhan mengalami penurunan kembali, kondisi ini dipengaruhi oleh turunnya nilai produksi hampir di semua sektor, utamanya sektor yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pembentukan PDRB kota Surakarta yaitu sektor industri. Inflasi yang cukup tinggi juga mempengaruhi penurunan ini, khususnya di sektor jasa-jasa dan sektor bangunan atau konstruksi.

Tahun 2000 kondisi ekonomi kota Surakarta sedikit lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 1999. Berdasarkan hasil perhitungan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2000 terjadi kenaikan yang relatif lebih baik, yaitu sebesar 16,50%. Namun beda halnya yang terjadi pada tahun 2001, laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 12,02% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dari tabel tersebut juga bisa terlihat bahwa semenjak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan dan mulai tahun 1999 – 2001 terjadi pertumbuhan positif meskipun keadaan ekonomi masih belum menggembirakan, pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor telah mengalami kenaikan walaupun relatif kecil.